

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK
DENGAN
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME**

**NOMOR : [REDACTED]
NOMOR : HK.02.00/08/2025**

TENTANG

**LAYANAN MANDIRI PAYROLL PLUS
UNTUK BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME**

Pada hari ini Senin tanggal Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (05 - 05 - 2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. [REDACTED] : Selaku Senior Vice President PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Nomor KEP.DIR/HC.425/2025. berkedudukan di Wisma Mandiri II, Jalan Kebon Sirih No. 83, Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. [REDACTED] : Selaku Kepala Biro Umum Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dalam jabatannya tersebut berwenang bertindak secara sah untuk dan atas nama serta mewakili Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Nomor 252 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Tinggi Pratama dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, berkedudukan di Indonesia Peace and Security Center, Jalan Anyar, Desa Tangkil, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

[REDACTED]

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan usaha jasa-jasa perbankan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unit kerja di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang berwenang dan bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan Barang Milik Negara, pengelolaan kepegawaian dan organisasi ketatalaksanaan, keuangan, dan pelaksanaan tata usaha pimpinan, keprotokolkan, serta pengamanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kedudukan serta tugas masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja Sama tentang Layanan Mandiri *Payroll* Plus yang selanjutnya disebut **Perjanjian**, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan:

- a. **Cabang Bank** adalah kantor-kantor Cabang Bank Mandiri di seluruh wilayah Indonesia.
- b. **Cabang Pelaksana** adalah kantor Cabang Bank Mandiri yang memberikan layanan Layanan Mandiri *Payroll*.
- c. **Data Pribadi** adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
- d. **Gaji** adalah penghasilan bulanan yang dibayarkan secara rutin kepada Pegawai **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan perundang-undangan pada satuan kerja.
- e. **Hari Kalender** adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius (masehi) tanpa kecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.
- f. **Hari Kerja** adalah hari di mana **PIHAK KESATU** buka untuk menjalankan kegiatan usahanya yang berlaku pada Bank Indonesia dan/atau Pemerintah setempat yang diikuti oleh perbankan nasional.
- g. **Layanan Mandiri *Payroll*** adalah layanan pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja, dan/atau tunjangan lainnya kepada pegawai **PIHAK KEDUA** yang dijalankan berdasarkan kesepakatan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sesuai yang diatur di dalam Perjanjian.
- h. **Mandiri Kopra Cash Management** yang selanjutnya disingkat KCM adalah layanan perbankan elektronik yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** kepada nasabah untuk melakukan aktivitas keuangan meliputi akses informasi, melakukan berbagai jenis transaksi sesuai fitur MCM saat ini dan yang akan dikembangkan di kemudian hari.
- i. **Mandiri Tabungan *Payroll*** adalah rekening tabungan atas nama Pegawai yang dipergunakan untuk pembayaran pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja, dan/atau tunjangan lainnya yang dapat diberikan fasilitas kartu Mandiri Debit dan layanan elektronik.
- j. **Paket *Payroll* PLUS** Bank Mandiri adalah layanan perbankan yang disusun secara khusus bagi Pegawai **PIHAK KEDUA** sebagai *benefit* tambahan atas Layanan Mandiri *Payroll* berupa penawaran paket produk dengan fitur yang lebih kompetitif dari segi fitur dan proses pengajuan dibandingkan

dengan produk perbankan reguler (*non Payroll*) termasuk tidak terbatas pada penggunaan Produk Kredit Konsumer dan Produk Anak Perusahaan dari **PIHAK KESATU**.

- k. **Pegawai** adalah perseorangan yang bekerja di lingkungan **PIHAK KEDUA** yang memperoleh Gaji, Tunjangan Kinerja, dan/atau tunjangan lainnya dari **PIHAK KEDUA** setiap bulan berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** melalui perantara **PIHAK KESATU**.
- l. **Pelindungan Data Pribadi** yang selanjutnya disingkat PDP adalah keseluruhan upaya untuk melindungi Data Pribadi dalam rangkaian pemrosesan Data Pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek Data Pribadi.
- m. **Penerima** adalah pegawai **PIHAK KEDUA** yang membuka dan/atau mempunyai rekening di kantor Cabang Bank atau di Bank Lain.
- n. **Pengendali Data Pribadi** adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan Data Pribadi.
- o. **Produk Kredit Konsumer** adalah layanan jasa keuangan Gaji, Tunjangan Kinerja, dan/atau tunjangan lainnya yang dimiliki oleh **PIHAK KESATU** termasuk dan tidak terbatas pada Kartu Kredit, Mandiri karya yang meliputi Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/*House Ownership Program* (HOP), Kredit Serbaguna Mandiri (KSM), dan Kredit Kendaraan Bermotor (KKB).
- p. **Produk Anak Perusahaan PIHAK KESATU** adalah produk dari anak perusahaan dalam satu grup **PIHAK KESATU**.
- q. **Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara** yang selanjutnya disingkat SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen anggaran, manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, manajemen kas, dan pelaporan yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- r. **Soft Copy** adalah data dengan format *text file* yang dikirim oleh **PIHAK KEDUA** dalam kondisi enkripsi yang memuat data Pegawai, nomor rekening pegawai, jumlah nominal uang yang dikirimkan untuk tiap-tiap penerima dan data lain yang diperlukan dalam kepentingan pembayaran penghasilan tersebut.
- s. **Subjek Data Pribadi** adalah orang perseorangan yang pada dirinya melekat Data Pribadi.
- t. **Tunjangan Kinerja** adalah tunjangan tambahan di luar gaji pokok yang diberikan kepada Pegawai berdasarkan jabatan dan capaian kinerja dari masing-masing Pegawai sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dimaksudkan untuk menjadi landasan **PARA PIHAK** dalam rangka Penyediaan Layanan Perbankan Pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja, dan/atau tunjangan lainnya di lingkungan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Perjanjian ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan keamanan, kemudahan dan kenyamanan dalam layanan pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja, dan/atau tunjangan lainnya serta transaksi perbankan lainnya di lingkungan **PIHAK KEDUA** melalui layanan jasa perbankan **PIHAK KESATU**;
 - b. memberikan fasilitas jasa perbankan lainnya kepada Pegawai yaitu fasilitas Paket *Payroll PLUS* Bank Mandiri, sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**;

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini meliputi:

- (1) Penatausahaan Layanan Mandiri *Payroll* Pegawai **PIHAK KEDUA** yang dilaksanakan melalui **PIHAK KESATU** melalui mekanisme SPAN dan/atau melalui Kantor Cabang Pelaksana dan/atau *Payroll Management Platform* (PMP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Penyediaan layanan dan fasilitas perbankan lainnya kepada **PIHAK KEDUA** sesuai syarat dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**.
- (3) Paket *Payroll* PLUS Bank Mandiri sebagai *Benefit*/manfaat tambahan untuk nasabah pengguna Layanan Mandiri *Payroll*.

PASAL 4 MEKANISME LAYANAN MANDIRI *PAYROLL*

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan Layanan Mandiri *Payroll* untuk Pegawai **PIHAK KEDUA** melalui mekanisme SPAN dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Penyaluran Pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja, dan/atau tunjangan lainnya Pegawai **PIHAK KEDUA** yang berada di lingkungan Kantor **PIHAK KEDUA**.
 - b. **PIHAK KESATU** wajib menyediakan layanan perbankan/layanan pembayaran penyaluran Pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja, dan/atau tunjangan lainnya untuk Pegawai **PIHAK KEDUA** sebagaimana tersebut dalam ayat (1) Pasal ini.
- (2) Prosedur Layanan Mandiri *Payroll* melalui mekanisme SPAN sebagaimana diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keperluan Pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja, dan/atau tunjangan lainnya **PIHAK KEDUA**, sesuai yang diatur dalam Lampiran 1 Perjanjian.
- (3) Dalam pelaksanaan Layanan Mandiri *Payroll*, **PIHAK KEDUA** setuju untuk membebaskan **PIHAK KESATU** dari segala tanggung jawab dan risiko yang timbul dari adanya perintah yang tidak dilaksanakan atau dilaksanakan tidak tepat waktu, termasuk namun tidak terbatas karena hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak tersedianya dana dari **PIHAK KEDUA** yang cukup di rekening sumber untuk melaksanakan perintah pembayaran *Payroll* tersebut;
 - b. Dana untuk pembayaran *Payroll* belum efektif dikuasai **PIHAK KESATU**;
 - c. Jumlah Penerima *Payroll* pada Daftar Penerima tidak sesuai dengan data pada Surat Perintah;
 - d. Berakhirnya masa berlaku Perjanjian atau adanya pembatalan Perjanjian;
 - e. Kondisi *Force Majeure* sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 5 PEMBUKAAN DAN PENATAUSAHAN REKENING PEMBAYARAN *PAYROLL*

- (1) Setiap Pegawai **PIHAK KEDUA** yang akan ber-*Payroll* dengan **PIHAK KESATU**, wajib memiliki Tabungan *Payroll* **PIHAK KESATU** (Mandiri Tabungan *Payroll*).
- (2) Ketentuan pembukaan rekening Mandiri Tabungan *Payroll* mengacu kepada ketentuan pembukaan rekening perorangan yang berlaku di **PIHAK KESATU** dengan membawa e-KTP, NPWP (apabila ada), dan bukti kepegawaian /surat pengantar dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pembukaan rekening Mandiri Tabungan *Payroll* dilakukan oleh Pegawai secara mandiri tanpa diwakilkan dengan mendatangi langsung kantor cabang **PIHAK KESATU** atau secara kolektif melalui petugas **PIHAK KESATU** yang melakukan kunjungan langsung ke lokasi **PIHAK KEDUA**.

- (4) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab terhadap kesesuaian, kelengkapan, dan kebenaran terhadap isi Surat Pengantar Pembukaan Rekening dari **PIHAK KEDUA**. Segala isi yang tercantum dalam dokumen-dokumen tersebut sepenuhnya merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (5) Pembukaan rekening tabungan *Payroll* atas nama Pegawai **PIHAK KEDUA** adalah dalam mata uang rupiah serta diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU** sepanjang telah memenuhi syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (6) Untuk pengelolaan Rekening Mandiri Tabungan *Payroll*, setiap bulan Penerima dikenakan biaya administrasi yang telah disetujui oleh **PIHAK KESATU** sesuai ketentuan yang berlaku dengan rincian sebagai berikut:

Jenis Tabungan <i>Payroll</i>	Rekening Tabungan			Kartu Mandiri Debit	
	Biaya admin bulanan	Setoran Awal	Saldo Minimal	Biaya Penerbitan Kartu	Biaya Admin Bulanan
Mandiri Tabungan <i>Payroll</i>	Rp2.000,-	Rp0,- atau sesuai Gaji/Tunjangan Kinerja pertama	Rp10.000,-	Rp 0 untuk penerbitan kartu pertama & biaya admin Sesuai jenis kartu	

- (7) Sedangkan untuk biaya administrasi Kartu Mandiri Debit, disesuaikan dengan jenis kartu yang dipilih dan dibebankan ke masing-masing Rekening Penerima dan di debet secara otomatis oleh sistem yang berlaku pada **PIHAK KESATU**.
- (8) **PIHAK KESATU** akan melakukan *review* atas *benefit*/manfaat fasilitas Mandiri Tabungan *Payroll* setiap 2 (dua) tahun sejak Perjanjian ini ditandatangani, demikian seterusnya sepanjang Perjanjian ini masih berlaku.
- (9) Hasil *review* atas *benefit*/manfaat fasilitas Mandiri Tabungan *Payroll* akan diinformasikan oleh **PIHAK KESATU** secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA**.
- (10) Apabila berdasarkan pemantauan **PIHAK KESATU** secara sistem didapatkan data bahwa Penerima tidak lagi menerima Gaji, Tunjangan Kinerja, dan/atau tunjangan lainnya dan/atau penghasilan lain yang sah dari **PIHAK KEDUA** dalam 3 (tiga) bulan berturut-turut, maka **PIHAK KESATU** berhak untuk melakukan konversi Mandiri Tabungan *Payroll* milik Penerima tersebut menjadi Mandiri Tabungan Reguler atau produk lain yang ditentukan **PIHAK KESATU**, dan seluruh *benefit Payroll* **PIHAK KESATU** tidak berlaku lagi bagi si penerima tersebut.
- (11) Penutupan rekening atas nama perorangan dilaksanakan atas dasar permintaan secara tertulis.

PASAL 6

BENEFIT/MANFAAT LAYANAN MANDIRI PAYROLL

Pengguna Layanan Mandiri *Payroll* akan mendapatkan *benefit*/manfaat melalui Paket *Payroll* Plus **PIHAK KESATU**, dengan rincian sebagai berikut :

- (1) **PIHAK KEDUA** akan mendapatkan *benefit*/manfaat berupa layanan *platform digital* Kopra by Mandiri,
- (2) *Benefit*/manfaat yang diberikan kepada Pegawai **PIHAK KEDUA** yang ber-*Payroll* dengan **PIHAK KEDUA** berupa pemberian fasilitas produk **PIHAK KEDUA** dan/atau produk Anak Perusahaan **PIHAK KESATU** dengan komitmen kemudahan proses serta bunga dan biaya khusus sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KESATU**, yang meliputi :
 - a. Produk Kredit Konsumer:
 - i. Kredit Pemilikan Rumah (KPR)/*House Ownership Program* (HOP);
 - ii. Kartu kredit;
 - iii. Kredit Kendaraan Bermotor (KKB)/*Car Ownership Program* (COP);
 - iv. Kredit Serbaguna-Mandiri (KSM).
 - b. Layanan Transaksi (*e-banking*):
 - i. Mandiri SMS;
 - ii. *Living by Mandiri*.
 - c. Investasi (*Wealth Management*).
 - d. Serta termasuk namun tidak terbatas pada produk-produk Anak Perusahaan **PIHAK KESATU**.

- (3) Bagi **PIHAK KEDUA** yang akan menggunakan dan mendapatkan *benefit*/manfaat Produk Kredit Konsumer bagi Pegawainya, maka **PIHAK KEDUA** wajib untuk memenuhi ketentuan pada syarat dan ketentuan Produk Konsumer yang tercantum pada Lampiran 4 Perjanjian Kerja Sama. **PIHAK KESATU** berhak untuk menyesuaikan atau tidak memberikan/menghentikan *benefit*/manfaat Produk Kredit Konsumer apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi sebagian/seluruh ketentuan pada Lampiran Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 7 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk:

- a. menerima pencairan dana dari KPPN pelaksanaan pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja, dan/atau tunjangan lainnya;
- b. menerima R-SP2D dari KPPN apabila terdapat retur dalam pelaksanaan pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja, dan/atau tunjangan lainnya Pegawai;
- c. menerima keterangan yang sebenarnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Layanan Mandiri *Payroll* berikut *benefit*/manfaat tambahannya;
- d. menerima keterangan dan data lainnya yang diperlukan **PIHAK KESATU** yang berkaitan dengan Layanan Mandiri *Payroll* berikut *benefit*/manfaat tambahannya kepada Pegawai **PIHAK KEDUA**
- e. membuka dan/atau menempatkan layanan perbankan **PIHAK KESATU** di lingkungan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**;

- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:

- a. melayani pembukaan rekening tabungan untuk Pegawai **PIHAK KEDUA**;
- b. memberikan Layanan Mandiri *Payroll* tepat waktu, tepat jumlah tepat sasaran dari **PIHAK KEDUA** berikut *benefit*/manfaat tambahannya;
- c. memberikan fasilitas perbankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**.

- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:

- a. mendapat Layanan Mandiri *Payroll* tepat waktu, tepat jumlah, tepat sasaran dari **PIHAK KESATU** sesuai SP2D selama alokasi dana pada rekening Gaji, Tunjangan Kinerja, dan/atau tunjangan lainnya untuk **PIHAK KEDUA** mencukupi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berikut *benefit*/manfaat tambahannya;
- b. mendapatkan layanan Mandiri *Kopra Cash Management* **PIHAK KESATU** sesuai dengan kebutuhan transaksi **PIHAK KEDUA**;
- c. mendapat fasilitas perbankan lainnya dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**.

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:

- a. membuka rekening tabungan Pegawai pada **PIHAK KESATU** sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK KESATU**;
- b. memberikan keterangan yang sebenarnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Layanan Mandiri *Payroll* berikut *benefit*/manfaat tambahannya;
- c. memberikan keterangan dan data lainnya yang diperlukan **PIHAK KESATU** yang berkaitan dengan Layanan Mandiri *Payroll* berikut *benefit*/manfaat tambahannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bertanggung jawab atas kebenaran informasi yang tertuang dalam surat permohonan pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja, dan/atau tunjangan lainnya, daftar nominatif

pembayaran Gaji, Tunjangan Kinerja, dan/atau tunjangan lainnya dan surat kuasa pendebitan rekening Tunjangan Kinerja.

PASAL 8 **BIAYA-BIAYA**

Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan/atau atas kesepakatan **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9 **KLAIM PEGAWAI**

- (1) Apabila terjadi perselisihan atau pertentangan antara **PIHAK KEDUA** dengan Penerima antara lain yang berkaitan dengan jumlah yang dibayarkan serta tanggal pembayaran, maka sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas segala tuntutan, gugatan, ataupun ganti rugi dalam bentuk apapun dari Penerima atau **PIHAK** ketiga lainnya, serta **PIHAK KEDUA** akan menanggung seluruh biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan tuntutan, gugatan, ataupun ganti rugi tersebut.
- (2) Dalam hal terdapat klaim dari Penerima berkaitan dengan kekurangan atau keterlambatan penerimaan pembayaran maka **PIHAK** yang menerima klaim dari Penerima wajib segera memberitahu dan mengadakan pertemuan dengan **PIHAK** lainnya atau paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterimanya klaim Penerima dimaksud. Hasil pertemuan akan dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (3) Jika dari pertemuan tersebut terbukti ada kesalahan yang dilakukan oleh **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA** maka **PIHAK** yang melakukan kesalahan sebagaimana dimaksud klaim penerima wajib diselesaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Berita Acara ditandatangani **PARA PIHAK**, namun jika tidak terbukti ada kesalahan yang dilakukan baik oleh **PIHAK KESATU** dan/atau **PIHAK KEDUA**, maka **PARA PIHAK** akan memberikan penjelasan kepada pegawai Penerima mengenai hal dimaksud.

PASAL 10 **PUBLIKASI DAN SOSIALISASI**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk secara bersama-sama atau sendiri-sendiri melaksanakan kegiatan publikasi atau sosialisasi tentang kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana ayat (1) di atas, **PARA PIHAK** dapat menggunakan nama dan logo **PIHAK** lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa segala biaya yang timbul sehubungan dengan publikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas menjadi tanggungan masing-masing **PIHAK** yang melaksanakan publikasi atau sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 11 **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** sehubungan dengan Perjanjian ini, kepada **PIHAK** Lain di luar **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian ini, kecuali:



- a. ada persetujuan tertulis dari **PIHAK** pemilik data, informasi atau dokumen;
 - b. data, informasi atau dokumen yang dimaksud telah diketahui publik;
 - c. ada perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan/atau
 - d. ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data dan informasi dan/atau dokumen dimaksud.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat bahwa data, informasi dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian ini dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian ini
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap data, informasi, atau dokumen apapun yang didistribusikan kepada **PIHAK** lainnya akan dianggap sebagai data, informasi atau dokumen yang bersifat rahasia, kecuali dinyatakan sebaliknya.
- (5) Pendistribusian data, informasi atau dokumen apapun wajib mengikuti prosedur sebagai berikut:
- a. data/dokumen yang memuat informasi sensitif dengan tingkat kritikalitas tinggi oleh Pemberi Informasi (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) wajib disertai dengan persetujuan tertulis dari Pejabat/**PIHAK** yang berwenang pada **PIHAK** Pemberi Informasi yang bertanggung jawab atas informasi tersebut.
 - b. Setiap pendistribusian data, informasi, atau dokumen apapun yang bersifat rahasia, wajib didokumentasikan di dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, yang paling sedikit memuat keterangan sebagai berikut:
 1. Identitas pemberi data, informasi atau dokumen ("Pemberi Informasi");
 2. Identitas penerima data, informasi atau dokumen ("Penerima Informasi");
 3. Jenis informasi yang didistribusikan;
 4. Waktu penerimaan informasi; dan
 5. Tanda tangan Penerima.
 - c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak berlaku dalam hal pendistribusian data, informasi atau dokumen telah diperjanjikan secara khusus dalam Perjanjian ini atau diwajibkan/diatur khusus dalam peraturan perundang-undangan.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap pendistribusian data, informasi atau dokumen apapun kepada **PIHAK** Lainnya akan dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- a. Distribusi informasi melalui dokumen fisik harus dilakukan menggunakan amplop tertutup dan diberikan langsung kepada Penerima.
 - b. Distribusi informasi secara elektronik dilakukan melalui media atau layanan elektronik yang telah disetujui oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian ini, dengan menerapkan pengamanan seperti tambahan perlindungan kata sandi atau enkripsi. Informasi diberikan langsung kepada Penerima Informasi yang telah disetujui.
- (7) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak melakukan distribusi data, informasi atau dokumen apapun melalui layanan elektronik yang bersifat publik, seperti layanan cloud dan e-mail publik, tanpa melakukan pengamanan tambahan seperti penggunaan kata sandi atau enkripsi yang diberikan langsung kepada Penerima.
- (8) Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan kerahasiaan ini, maka **PIHAK** yang terbukti melanggar wajib untuk memberikan ganti rugi kepada **PIHAK** yang dirugikan, termasuk menanggung segala risiko finansial dan risiko hukum yang mungkin timbul atas keberatan, gugatan atau klaim dari **PIHAK** manapun.

- (9) Ketentuan kerahasiaan dalam pasal ini akan tetap berlaku walaupun Perjanjian telah berakhir dengan sebab apapun.

PASAL 12

PELINDUNGAN DATA PRIBADI

- (1) **PARA PIHAK** bertindak sebagai Pengendali Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi akan menentukan tujuan pemrosesan data pribadi dan akan melakukan seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi berdasarkan Perjanjian ini, kebijakan masing-masing **PIHAK** atau perjanjian khusus lainnya yang dibuat terpisah yang juga mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi beserta seluruh perubahan dan aturan pelaksanaannya.
- (2) Pengendali Data Pribadi, telah memiliki dasar pemrosesan yang sah dan wajib untuk mematuhi unsur-unsur dasar pemrosesan Data Pribadi sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang PDP.
- (3) Pemrosesan Data Pribadi yang akan dilakukan oleh Pengendali Data Pribadi sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat disepakati bersama dalam perjanjian terpisah.
- (4) Dalam menjalankan pemrosesan Data Pribadi sebagaimana diatur pada ayat (2), Pengendali Data Pribadi berkewajiban untuk:
 - a. memastikan bahwa tujuan dari masing-masing pemrosesan Data Pribadi oleh Pengendali Data Pribadi adalah untuk melaksanakan pembukaan rekening *Payroll* dan pelaksanaan layanan mandiri *Payroll*.
 - b. memastikan akurasi, kelengkapan, dan konsistensi Data Pribadi antara lain dengan melakukan verifikasi;
 - c. memenuhi seluruh hak Subjek Data Pribadi;
 - d. melakukan perekaman terhadap seluruh kegiatan pemrosesan Data Pribadi;
 - e. melindungi dan memastikan keamanan Data Pribadi yang diprosesnya dengan melakukan;
 - 1) penyusunan dan penerapan langkah teknis operasional dan organisasi yang tepat untuk melindungi Data Pribadi dari gangguan pemrosesan Data Pribadi yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) penentuan tingkat keamanan Data Pribadi dengan memperhatikan sifat dan risiko dari Data Pribadi yang harus dilindungi dalam pemrosesan Data Pribadi.
 - f. menjaga kerahasiaan Data Pribadi dan tidak melakukan transfer atas Data Pribadi yang merupakan objek pemrosesan bersama kepada **PIHAK** ketiga mana pun tanpa persetujuan dari Pengendali Data Pribadi lainnya;
 - g. melakukan pengawasan terhadap setiap **PIHAK** di bawah kendali Pengendali Data Pribadi yang terlibat dalam pemrosesan Data Pribadi, termasuk memastikan prosesor yang dilibatkan oleh masing-masing Pengendali Data Pribadi memiliki bentuk PDP yang minimal sama dengan Perjanjian ini;
 - h. melindungi Data Pribadi dari pemrosesan yang tidak sah, termasuk melakukan tindakan pencegahan antara lain dengan menggunakan sistem keamanan atau sistem elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab; dan
 - i. segera memberitahu pengendali lainnya apabila terdapat pelanggaran atas Data Pribadi atau pemrosesan yang tidak sah termasuk apabila terjadi kehilangan atau kerusakan terhadap Data Pribadi yang diproses.
- (5) Pengendali Data Pribadi sepakat untuk menunjuk pejabat PDP *Data Protection Officer* yang selanjutnya disingkat DPO untuk memenuhi fungsi PDP.
- (6) Dalam hal Subjek Data Pribadi menarik kembali persetujuan pemrosesan Data Pribadi tentang dirinya yang telah diberikan kepada Pengendali Data Pribadi

("penarikan persetujuan"), mengajukan keberatan atas tindakan pengambilan keputusan yang hanya didasarkan pada pemrosesan secara otomatis, termasuk pemfilan, yang menimbulkan akibat hukum atau berdampak signifikan pada Subjek Data Pribadi ("Pengajuan Keberatan"), atau menunda atau membatasi pemrosesan Data Pribadi secara proporsional sesuai dengan tujuan pemrosesan Data Pribadi ("Penundaan Pemrosesan"), maka Penarikan Persetujuan, Pengajuan Keberatan, atau Penundaan Pemrosesan tersebut dapat dilakukan secara tertulis kepada DPO yang telah ditunjuk, dengan rincian sebagai berikut:

Nama: Data Protection Operations Dept
 Jabatan: Data Protection Officer
 Email: pdp.office@bankmandiri.co.id

Penarikan Persetujuan dan Pengajuan Keberatan tersebut di atas wajib ditindak lanjuti oleh Pengendali Data Pribadi paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak permintaan untuk Penarikan Persetujuan dan Pengajuan Keberatan diterima.

- (7) Dalam hal terjadi kegagalan PDP, maka Pengendali Data Pribadi yang bertanggung jawab atas kegagalan tersebut dalam jangka waktu 1 x 24 jam kepada Pengendali Data Pribadi lain sejak diketahuinya adanya kegagalan perlindungan data tersebut, termasuk untuk menyampaikan pemberitahuan tertulis kegagalan PDP tersebut dalam waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam kepada Subjek Data Pribadi dan lembaga yang bersangkutan.
- (8) Pengendali Data Pribadi dapat mengatur pembagian risiko dan kerugian dalam perjanjian yang terpisah.
- (9) Dalam hal terdapat terjadi kegagalan PDP yang disebabkan karena kelalaian dan/atau kesegajaan salah satu **PIHAK** yang mengakibatkan kerugian baik secara materil maupun immateril maka **PIHAK** yang bersangkutan wajib bertanggung jawab atas kelalaian dan kegagalan tersebut.
- (10) Dengan ditandatanganinya Perjanjian ini maka dengan sadar **PARA PIHAK** menyatakan telah memberikan persetujuan untuk melakukan pemrosesan Data Pribadi sesuai sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 13 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, berlaku efektif sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 5 Mei 2030 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Salah satu **PIHAK** berhak untuk mengakhiri Perjanjian secara sepihak sebelum jangka waktu berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila:
 - a. salah satu **PIHAK** telah dinyatakan wanprestasi oleh **PIHAK** lainnya;
 - b. salah satu **PIHAK** tidak lagi menjalankan kegiatan usahanya; atau
 - c. adanya ketentuan hukum atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian ini bertentangan dengan ketentuan yang dimaksud apabila tetap dilaksanakan.
- (4) Dalam hal ditentukan lain dalam Perjanjian ini, pengakhiran Perjanjian tidak menghapuskan kewajiban masing-masing **PIHAK** yang telah timbul dan belum dilaksanakan pada saat berakhirnya

Perjanjian, dan oleh karenanya **PIHAK** yang masih mempunyai kewajiban yang belum dilaksanakan terhadap **PIHAK** lainnya tetap terikat atas pelaksanaan kewajiban yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini;

- (5) Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud pada pasal ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata.

PASAL 14 **KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, dokumen, dan korespondensi lainnya di antara **PARA PIHAK**, harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), atau *email* dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Government Solution Group

u.p. :

Alamat :

Telepon :

Email :

b. PIHAK KEDUA

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

u.p. :

Alamat :

Telepon :

Email :

Dalam hal salah satu **PIHAK** akan mengubah alamat, wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan alamat tersebut.

- (2) Segala akibat yang timbul karena perubahan alamat yang tidak diberitahukan kepada **PIHAK** lainnya, sepenuhnya menjadi risiko dan tanggung jawab **PIHAK** yang mengubah alamat.

PASAL 15 **PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian ini paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) **PARA PIHAK** dapat melakukan koreksi apabila diketahui telah terjadi kesalahan pembukuan dalam pelimpahan, berdasarkan hasil Pemantauan dan Evaluasi, dan **PIHAK** yang melakukan koreksi wajib memberitahukan koreksi tersebut kepada **PIHAK** lainnya paling lama 1 (satu) hari setelah dilakukan koreksi, disertai dengan bukti dan alasan dilakukannya koreksi.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam Perjanjian selanjutnya.

PASAL 16
KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK yang** digolongkan sebagai Keadaan Kahar.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan Keadaan Kahar meliputi bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang penanggulangan bencana yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapuskan atau mengakhiri Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal Keadaan Kahar berakhir dan kondisinya masih memungkinkan kegiatan dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
- (6) Keadaan Kahar yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Perjanjian ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak merupakan alasan untuk pengakhiran atau pembatalan Perjanjian, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menanggguhkan Perjanjian sampai Keadaan Kahar berakhir.

PASAL 17
PERJANJIAN ANTI SUAP DAN ANTI KORUPSI

- (1) **PARA PIHAK** masing-masing dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada pembayaran atau bentuk manfaat lain atau perlakuan khusus lainnya yang telah atau akan ditawarkan, dijanjikan atau diberikan, baik secara langsung ataupun tidak langsung, kepada Pejabat Publik, baik untuk pejabat publik itu sendiri maupun untuk badan lain dan orang lain, dengan maksud untuk mempengaruhi tindakan atau keputusan resminya, dan/atau agar ia menggunakan pengaruhnya terhadap suatu badan atau institusi pemerintahan, atau untuk memuluskan/memastikan diperolehnya suatu manfaat secara tidak patut atau tidak sah terkait dengan bisnis salah satu **PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa tidak ada pembayaran atau bentuk manfaat lain atau perlakuan khusus yang telah atau akan dijanjikan, ditawarkan, atau diberikan kepada **PIHAK** lain dengan maksud untuk mempengaruhi suatu tindakan, atau memuluskan/memastikan diperolehnya suatu manfaat secara tidak patut terkait dengan bisnis salah satu **PIHAK** dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) **PARA PIHAK** dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa **PIHAK-PIHAK** yang menjalankan pekerjaan berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini telah mengetahui dan memahami mengenai peraturan perundang-undangan, pembatasan-pembatasan, dan prinsip-prinsip sebagaimana diatur pada Perjanjian Kerja Sama ini dan oleh karena itu setuju untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menjamin kepatuhan orang-orang tersebut dalam pelaksanaan ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 18
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Setiap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan isi Perjanjian Kerja Sama ini diselesaikan bersama **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.



- (2) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka perselisihan yang timbul akan diselesaikan melalui Pengadilan, dalam hal ini **PARA PIHAK** memilih domisili hukum yang tetap pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
- (3) Penafsiran dan pelaksanaan serta segala akibat yang ditimbulkan oleh Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia.

PASAL 19

LAMPIRAN DAN SIFAT KETERPISAHAN

- (1) Setiap Lampiran yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dan melekat dalam Perjanjian ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, serta dalam pelaksanaannya tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya Perjanjian ini.
- (2) Apabila terdapat satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan tidak sah atau tidak dapat diberlakukan secara hukum baik secara keseluruhan maupun sebagian. Maka ketentuan lainnya Perjanjian ini akan tetap berlaku dan memiliki kekuatan hukum secara penuh bagi **PARA PIHAK**.
- (3) **PARA PIHAK** selanjutnya sepakat terhadap ketentuan yang tidak sah atau tidak dapat diberlakukan sebagaimana dimaksud oleh ayat 2 pasal ini, dapat diganti atau diubah dengan ketentuan yang sah menurut hukum dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sejauh serta sedapat mungkin mencerminkan maksud dan tujuan dibuatnya ketentuan tersebut oleh **PARA PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa perubahan lampiran-lampiran dari Perjanjian ini dapat dilakukan secara *loose leaf* (cukup diubah pada lampiran saja tanpa perlu mengubah Perjanjian) dengan cara surat menyurat atau apabila diperlukan dapat dilakukan melalui mekanisme addendum yang merupakan satu kesatuan dari Perjanjian ini.

PASAL 20

KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Setiap perubahan dan/atau segala sesuatu yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam surat-menyurat/addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) adanya Perjanjian ini, tidak membatasi **PIHAK KEDUA** untuk membuat perikatan kerja sama dengan **PIHAK** lain selain **PIHAK KESATU** terkait jasa perbankan.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (4) Hak dan kewajiban masing-masing **PIHAK** berdasarkan Perjanjian tidak dapat dialihkan, sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (5) Apabila terdapat pertentangan/perbedaan persepsi antara ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dengan surat-surat, lampiran-lampiran, addendum/amandemen, dan dokumen-dokumen lain, maka **PARA PIHAK** dengan ini setuju bahwa ketentuan-ketentuan yang berlaku adalah ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 21
KETENTUAN PENUTUP

- (1) Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai, dibubuhi cap dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

